

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Moral

1. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Definisi kata "pendidikan" menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar "didik" yang diberi imbuhan "pe" dan akhiran "an". Oleh karena itu, kata ini mengacu pada suatu metode, cara, atau tindakan dalam membimbing. Pengajaran dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan etika dan perilaku individu atau sosial, yang bertujuan mencapai kemandirian dengan matang atau kedewasaan melalui berbagai upaya seperti pendidikan, pembelajaran, bimbingan, dan pembinaan.¹⁵

Pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah proses yang dilakukan secara sadar dan dirancang dengan baik untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan peserta didik. Melalui pendidikan, setiap individu didorong untuk aktif menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik dalam aspek spiritual, pengendalian diri, pembentukan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, maupun keterampilan yang berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya. Jika disederhanakan, pendidikan dapat dipahami sebagai usaha manusia untuk memaksimalkan kemampuan fisik dan mental, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta kebudayaan setempat. Dalam pandangan saya, pendidikan dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling menguatkan. Budaya menjadi landasan nilai

¹⁵ Fitri Endang Srimulat, dkk. 'Teori-Teori Pendidikan'. Bandung : Widina Media Utama, cetakan 1 (2024) : hal

yang membentuk arah pendidikan, sementara pendidikan berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan budaya agar tetap relevan di tengah perubahan zaman.¹⁶

Al-Qur'an secara berulang menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya ilmu, manusia berpotensi terjerumus dalam kesengsaraan dan kebodohan. Oleh karena itu, Al-Qur'an mendorong umat manusia untuk terus menuntut ilmu. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 122, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَابْتُلُواهُمْ فَمَا جَاءَ مِنَ كُلِّ فِرْقَةٍ إِذَا
 طَافُوا عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا فِى الْبَيْتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِى الْبَيْتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِى الْبَيْتِ
 رَجَعُوا إِلَى الْبَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Dari hal tersebut, kita bisa menyadari betapa besar peran pengetahuan dalam menjaga dan menunjang kehidupan manusia. Melalui pengetahuan, seseorang dapat membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk, benar dan salah, serta yang memberikan manfaat maupun yang menimbulkan kerugian. Dengan

¹⁶ Maspa Makkawaru. ‘Pentingnya Pendidikan Bagi Kehidupan dan Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan’. IAIN Palopo : Jurnal Konsepsi, Vol. 8 No. 3 (2019) : hal 117

demikian, pengetahuan menjadi panduan penting dalam menjalani kehidupan secara bijak dan bertanggung jawab.¹⁷

b. Unsur-Unsur Pendidikan

Untuk mencapai kualitas pembelajaran yang berkualitas perlu dipahami unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan terdiri dari peserta didik, pendidik, interaksi edukatif antara pendidik, peserta didik, metode pendidikan, materi pendidikan, lingkungan pendidikan, alat dan fasilitas pendidikan, evaluasi pendidikan.

1) Pendidik

Pendidik adalah individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik. Menurut Sudhita, pendidik diharapkan memenuhi beberapa persyaratan, seperti kejujuran, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki reputasi yang tidak tercela dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal yang melibatkan kepolisian, kesehatan jasmani dan rohani yang baik, kualifikasi pendidikan yang sesuai, kemampuan untuk melaksanakan kompetensi pendidik, serta kepemilikan sertifikat pendidik.¹⁸

Dalam teori Emile Durkheim, seorang pendidik dianggap sebagai agen sosialisasi yang memiliki peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai sosial dan norma-norma kepada generasi muda. Pendidik bertanggung jawab untuk membantu membangun solidaritas sosial dan memperkuat integrasi dalam masyarakat. Menurut Durkheim, pendidik tidak hanya mengajarkan

¹⁷ Abd Rahman BP, dkk 'Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan', Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 1 (2022), Hal. 6–7.

¹⁸ Ni Luh Gede Erni Sulindawati, 'Analisis Unsur-Unsur Pendidikan Masa Lalu Sebagai Dasar Penentuan Arah Kebijakan Pembelajaran Pada Era Globalisasi', Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 4 No. 1 (2018), Hal. 55
<<https://doi.org/10.23887/jiis.v4i1.14363>>.

pengetahuan akademis, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter dan identitas sosial siswa. Pendidik diharapkan menjadi perantara yang membantu mengintegrasikan individu ke dalam norma-norma kolektif yang berlaku dalam masyarakat. Pendidik dalam teori Durkheim juga dianggap sebagai penjaga norma sosial, membantu menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dengan mengajarkan aturan-aturan yang diperlukan. Dengan demikian, peran seorang pendidik tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan pembentukan aspek sosial dan moral dalam perkembangan siswa.

2) Peserta Didik

Rahmat Hidayat menyimpulkan dari bahwa peserta didik adalah individu yang memiliki potensi dasar, baik secara fisik maupun psikis, yang memerlukan pengembangan. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pendidikan dari pihak pendidik menjadi sangat penting. Berbagai istilah seperti siswa, mahasiswa, santri, murid, pelajar, taruna, warga belajar, dan lainnya digunakan untuk merujuk kepada peserta didik.¹⁹

Dalam teori Emile Durkheim, peserta didik dilihat sebagai individu yang terlibat dalam proses sosialisasi melalui pendidikan. Durkheim menekankan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas sosial peserta didik, serta mengintegrasikan mereka ke dalam norma-norma sosial masyarakat. Peserta didik, menurut Durkheim, belajar tidak hanya pengetahuan akademis tetapi juga norma-norma dan nilai-nilai sosial yang diterapkan dalam masyarakat. Proses pendidikan membantu membangun solidaritas sosial dan memastikan bahwa peserta didik menjadi

¹⁹ Rahmat Hidayat dan Abdillah, "*Ilmu Pendidikan (Konsep, Teori Dan Aplikasinya)*", cet. 1 (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019). Hal. 57.

bagian dari komunitas yang lebih besar dengan mematuhi norma-norma yang ada. Dengan demikian, peserta didik dalam teori Durkheim dianggap sebagai penerima dan pembentuk norma sosial, yang melalui pendidikan, berkontribusi pada kelangsungan solidaritas sosial dan integrasi masyarakat.

3) Metode Pendidikan

Secara etimologi, kata "metode" berasal dari dua kata, yaitu "*meta*" dan "*hodos*". "*Meta*" memiliki arti "melalui", sementara "*hodos*" berarti "jalan" atau "cara". Dengan demikian, dari perspektif ini, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai cara yang telah diatur dan dipertimbangkan dengan baik untuk mencapai suatu maksud, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan dan bidang lainnya.²⁰

Al Rasyidin memberikan beberapa hal untuk dipertimbangkan pendidik dalam pemilihan metode pendidikan yaitu²¹:

- a) Tujuan dan target pembelajaran yang ingin dicapai.
- b) Ruang lingkup dan urutan materi/ bahan pembelajaran.
- c) Pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.
- d) Kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
- e) Motivasi/minat peserta didik.
- f) Kemampuan peserta didik dalam melakukan sesuatu.
- g) Ukuran kelas dan suasana lingkungan pembelajaran.
- h) Alokasi waktu atau jam pembelajaran yang tersedia.

²⁰ DEPDIKNAS, '*Sistem Pendidikan Nasional*', Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003, 2003 <<https://doi.org/10.30957/cendekia.v16i1.717>>.

²¹ Ahmad Sukri Harahap. 'METODE PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM'. Medan: Jurnal Hikmah, Vol. 15 No. 1 (2018): hal 14

- i) Kemampuan peserta didik.
- j) Sarana dan fasilitas pembelajaran yang tersedia.

Dalam teori Emile Durkheim, metode pendidikan dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial. Durkheim menekankan pentingnya pembelajaran kolektif dan penekanan pada nilai-nilai sosial. Metode pendidikan yang digunakan seharusnya memfasilitasi integrasi individu ke dalam masyarakat dan mentransmisikan norma-norma sosial. Durkheim mendukung metode pengajaran yang menekankan solidaritas sosial dan kepatuhan terhadap norma-norma kolektif. Pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota produktif dalam masyarakat dengan mengajarkan aturan-aturan sosial dan nilai-nilai bersama. Metode ini dapat mencakup pendekatan pengajaran yang menekankan kerja sama, partisipasi dalam kegiatan kolektif, dan pemberian pengetahuan yang menggambarkan norma-norma sosial masyarakat. Dalam konteks metode evaluasi, Durkheim berpendapat bahwa penilaian harus mencerminkan tidak hanya pencapaian individu tetapi juga kontribusi mereka terhadap solidaritas sosial. Dengan demikian, metode pendidikan dalam teori Durkheim seharusnya tidak hanya mempersiapkan individu untuk berhasil secara pribadi tetapi juga untuk berfungsi secara positif dalam kerangka sosial yang lebih luas.

4) Materi Pendidikan

Materi pendidikan merupakan bahan ajar dalam suatu pendidikan dan merupakan pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Kurikulum ini menampung

materi-materi pendidikan secara terstruktur. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal.²²

Dalam teori Emile Durkheim, materi pendidikan dipandang sebagai alat untuk mentransmisikan nilai-nilai sosial dan norma-norma kolektif kepada peserta didik. Durkheim percaya bahwa materi pendidikan harus mencerminkan realitas sosial masyarakat dan membantu membentuk solidaritas sosial. Beberapa prinsip terkait materi pendidikan dalam teori Durkheim melibatkan:

- a) Materi pembelajaran harus mencakup pengajaran tentang norma-norma dan aturan-aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Ini membantu peserta didik memahami tata cara dan nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Materi harus dirancang untuk mempromosikan pemahaman tentang solidaritas sosial. Ini termasuk konsep-konsep seperti tanggung jawab sosial, kerjasama, dan ketergantungan dalam masyarakat.
- c) Materi pendidikan seharusnya relevan dengan konteks sosial dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal ini untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam situasi sosial nyata.
- d) Durkheim mendukung pendekatan pengajaran yang melibatkan pembelajaran kolektif, di mana peserta didik belajar bersama-sama dalam lingkungan yang menggambarkan solidaritas dan interaksi sosial.

Dengan fokus pada materi pendidikan yang menanamkan nilai-nilai sosial dan membangun solidaritas sosial, teori Durkheim bertujuan untuk

²² Aina Mulyana. 'Panduan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal'. Jelajah Informasi (2024). Dikutip Pada 14 Mei 2025 <<https://www.ainamulyana.com/2024/06/panduan.html?utmsource=googlevignette>>

menghasilkan individu yang terintegrasi dengan masyarakat dan mematuhi norma-norma yang berlaku.

5) Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan adalah tempat di mana kegiatan pembelajaran berlangsung secara aktif. Secara umum, lingkungan ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut sering kali disebut sebagai tiga pusat pendidikan yang saling melengkapi dalam proses pembentukan karakter dan pengetahuan.²³

Emile Durkheim memberikan perhatian khusus pada peran lingkungan pendidikan dalam membentuk individu dan masyarakat. Bagi Durkheim, lingkungan pendidikan seharusnya mencerminkan nilai-nilai sosial dan memberikan kontribusi pada integrasi sosial. Beberapa aspek lingkungan pendidikan menurut Durkheim melibatkan:

- a) Durkheim menekankan bahwa lingkungan pendidikan seharusnya menciptakan solidaritas sosial. Proses pembelajaran dan interaksi antar peserta didik harus membangun rasa persatuan dan ketergantungan dalam masyarakat.
- b) Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat di mana norma-norma dan aturan-aturan sosial diajarkan dan diterapkan. Ini membantu membentuk perilaku peserta didik sesuai dengan tata nilai kolektif.
- c) Durkheim mendukung ide pendidikan kolektif di mana peserta didik belajar bersama-sama dalam suatu lingkungan yang menciptakan

²³ Abd Rahman BP, Sabhayati Asri Munandar, Andi Fitriani, Yuyun Karlina, dan Yumriani, 'Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan', Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 1 (2022), Hal. 6-7

pengalaman solidaritas. Ini dapat mencakup kegiatan kelompok, proyek bersama, atau pembelajaran dalam konteks sosial.

- d) Lingkungan pendidikan seharusnya memiliki relevansi sosial. Materi pembelajaran dan kegiatan seharusnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dan mencerminkan realitas sosial masyarakat.

Dengan memahami dan menciptakan lingkungan pendidikan yang mempromosikan solidaritas sosial dan mentransmisikan norma-norma sosial, Durkheim berharap bahwa pendidikan dapat berkontribusi pada pembentukan individu yang terintegrasi dalam masyarakat.

6) Alat dan Fasilitas Pendidikan

Salah satu hal yang seharusnya menjadi fokus utama bagi para pengelola pendidikan adalah penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana pendidikan mencakup segala jenis peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung sekolah, ruang kelas, berbagai media pembelajaran, meja, kursi, dan lainnya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang berfungsi secara tidak langsung untuk menunjang kelancaran kegiatan pendidikan, misalnya area halaman sekolah, kebun atau taman, serta akses jalan menuju sekolah.²⁴

Emile Durkheim tidak secara rinci membahas alat dan fasilitas pendidikan dalam karyanya. Namun, berdasarkan prinsip-prinsip teorinya, dapat disimpulkan bahwa alat dan fasilitas pendidikan seharusnya mendukung tujuan integrasi sosial dan transmisi nilai-nilai kolektif. Beberapa pertimbangan yang dapat diambil dari perspektif Durkheim terkait alat dan fasilitas pendidikan melibatkan:

²⁴ Ahmad Nurabadi, "*Manajemen Sarana Dan Prasaran Pendidikan*" (Malang: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2014).

- a) Durkheim mendukung ide pendidikan kolektif. Oleh karena itu, ruang kelas dan fasilitas pembelajaran seharusnya dirancang untuk memfasilitasi interaksi sosial dan pembelajaran bersama.
- b) Alat pendidikan, seperti buku teks dan materi pembelajaran, seharusnya mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai sosial masyarakat. Mereka seharusnya digunakan untuk mentransmisikan aturan-aturan dan etika kolektif.
- c) Alat dan fasilitas pendidikan harus mendukung keberlanjutan solidaritas sosial. Ini mungkin melibatkan penyediaan ruang untuk kegiatan kelompok, proyek bersama, atau interaksi sosial lainnya.
- d) Fasilitas pendidikan seharusnya dirancang agar relevan dengan konteks sosial. Tempat-tempat tersebut dapat menciptakan lingkungan yang merefleksikan nilai-nilai dan realitas masyarakat sekitarnya.

Meskipun Durkheim tidak memberikan pandangan terperinci tentang alat dan fasilitas pendidikan, prinsip-prinsip dasar teorinya menekankan pentingnya elemen-elemen tersebut dalam mendukung pembentukan individu yang terintegrasi dalam masyarakat.

7) Evaluasi Pendidikan

Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam melakukan kegiatan evaluasi, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Penilaian adalah penetapan melalui angka dengan cara yang sistematis untuk menyatakan keadaan dan kondisi individu. Proses penilaian meliputi pengumpulan bukti-bukti tentang pencapaian belajar peserta didik. Bukti-bukti tersebut tidak harus melalui dan atau selalau diperoleh melalui tes saja, tetapi boleh jadi bisa juga dikumpulkan melalui pengamatan atau *self progress report*. Untuk itu, definisi

assesmen berkaitan dengan semua proses pendidikan, seperti karakteristik peserta didik, karakteristik metode pengajaran, sarana, administrasi dan kurikulum.²⁵

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan membuat penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi program pendidikan. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana tujuan pendidikan tercapai, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan kurikulum, metode pengajaran, atau kebijakan pendidikan.

Emile Durkheim memberikan perhatian terhadap evaluasi pendidikan dalam konteks tujuan sosialnya. Bagi Durkheim, evaluasi pendidikan seharusnya mencerminkan kontribusi individu terhadap solidaritas sosial dan pemahaman serta pematuhan terhadap norma-norma masyarakat. Beberapa aspek evaluasi pendidikan menurut Durkheim melibatkan:

- a) Durkheim percaya bahwa evaluasi pendidikan seharusnya tidak hanya memperhitungkan pencapaian individu, tetapi juga kontribusinya terhadap solidaritas sosial. Ini dapat mencakup penilaian terhadap partisipasi dalam kegiatan sosial, kerjasama, dan kontribusi positif terhadap komunitas.
- b) Evaluasi harus mencerminkan sejauh mana peserta didik memahami dan mematuhi norma-norma sosial. Ini melibatkan penilaian terhadap perilaku dan sikap peserta didik sesuai dengan nilai-nilai kolektif yang diharapkan.

²⁵ Dita Riskiana Firdaus, Nunuk Hariyati, dan Kaniati Amalia. 'Menguak Fondasi Evaluasi Pendidikan: Sebuah Kajian Landasan Teoritis Evaluasi Pendidikan'. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 6 No. 3 (2024): hal 6

- c) Durkheim mendukung pendidikan kolektif, dan evaluasi seharusnya mempertimbangkan kontribusi individu terhadap pembelajaran bersama dan interaksi sosial dalam kelompok.
- d) Evaluasi seharusnya juga mempertimbangkan sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik dapat diaplikasikan dalam konteks sosial nyata.

Dengan mengaitkan evaluasi pendidikan dengan aspek-aspek sosial dan moral, Durkheim berharap bahwa evaluasi tersebut akan menciptakan insentif bagi peserta didik untuk tidak hanya mencapai kesuksesan pribadi tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat secara keseluruhan.

2. Moral

a. Pengertian Moral

Kata "moral" berasal dari bahasa Latin, yaitu *mores*, yang berarti aturan, kebiasaan, atau adat istiadat. Moral merujuk pada karakter atau nilai-nilai yang tertanam dalam diri setiap individu, karena moral merupakan bagian yang melekat pada manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk. Sebagai ciptaan Tuhan yang dianugerahi kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan mengalami, manusia memiliki keistimewaan yang membedakannya. Oleh sebab itu, nilai-nilai moral secara alami tertanam dalam setiap pribadi manusia.²⁶

b. Proses Pembentukan Moral

Dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, seorang pendidik dapat membantu meningkatkan tingkat kedewasaan moral siswa. Namun, karena kedewasaan moral juga dipengaruhi oleh tahap perkembangan psikologis peserta didik, tidaklah realistis untuk mengajak anak-anak usia taman kanak-kanak

²⁶ Kartika Rinakit Adhe, 'Guru Membentuk Anak Yang Berkualitas', Jurnal Care Edisi Khusus Temu Ilmiah, Vol. 3 No. 3 (2016), Hal. 43.

berdiskusi tentang dilema moral yang kompleks. Pada tahap tersebut, yang penting adalah mengarahkan mereka untuk memahami alasan di balik setiap tindakan, sehingga mereka dapat mengerti mengapa peraturan itu dibuat dan harus diikuti.²⁷

Pada anak-anak berusia 9 hingga 12 tahun, yang menurut teori Piaget sedang berada pada tahap operasional formal, sangat dianjurkan untuk diperkenalkan dengan bahan-bahan diskusi moral. Pada usia ini, mereka mulai siap untuk berkembang dari tahap awal menuju tahap kedewasaan moral yang lebih tinggi. Diskusi tentang dilema moral bisa dilakukan dalam kegiatan kelas dengan menggunakan contoh-contoh yang diambil dari surat kabar, kejadian sehari-hari, atau masalah moral yang sering dihadapi dalam kehidupan. Diskusi seperti ini sangat bermanfaat karena dapat memicu anak-anak untuk berpikir dan mempertimbangkan tindakan mana yang sebaiknya dilakukan.

Peran guru dalam proses ini sangat penting. Guru harus mampu mengenali alasan-alasan yang dikemukakan oleh peserta didik, kemudian membantu merumuskan ulang dan memperjelas alasan tersebut agar lebih mudah dipahami. Selain itu, guru juga harus mampu memberikan kesimpulan yang tepat. Dalam mengarahkan diskusi, guru sebaiknya mengajukan pertanyaan atau alasan yang sedikit lebih rumit dari tingkat pemahaman moral rata-rata anak-anak di kelasnya. Hal ini bertujuan untuk menstimulasi mereka agar terus berpikir dan mengembangkan pemahamannya lebih jauh.

Seorang guru yang bijak juga perlu mengendalikan diri agar tidak mendominasi seluruh pembicaraan selama diskusi. Dengan demikian, semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan

²⁷ Abd Rohman, dkk. '*Studi Komparatif Perkembangan Moral Anak Usia Dini Dan Anak Usia Remaja Perspektif Teori Lawrence Kohlberg (MI Sholbiyah dan MA Salafiyah As-Syafi'iyah Bojonegoro)*'. Jurnal

mengemukakan pendapatnya. Tugas guru bukanlah menilai atau mengomentari moralitas gagasan yang disampaikan, melainkan membantu menyusun kembali argumen-argumen yang telah dikemukakan agar peserta didik dapat mendengar dan memahami sendiri ide-ide mereka. Dengan cara ini, mereka belajar untuk berpikir kritis dan menghargai pendapat orang lain, yang sangat penting dalam perkembangan moral mereka.²⁸

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa remaja, perkembangan moral akan lebih mudah terjadi apabila mereka diberi kesempatan yang cukup untuk "memerankan berbagai peran". Artinya, remaja perlu diajak untuk melihat suatu kejadian, permasalahan, atau situasi dari sudut pandang orang lain, serta mencoba memahami bagaimana rasanya berada dalam posisi tersebut. Pendekatan ini sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pengalaman mereka dalam menghadapi beragam situasi kehidupan. Namun, penting untuk diingat bahwa pengalaman saja belum cukup untuk membentuk perkembangan moral secara utuh. Yang lebih penting adalah adanya proses refleksi terhadap pengalaman tersebut. Melalui perenungan dan pemikiran mendalam atas apa yang telah dialami, nilai-nilai moral dapat dipahami dan diinternalisasi secara lebih bermakna dalam diri individu. Dengan kata lain, refleksi menjadi jembatan penting dalam mengubah pengalaman menjadi pembelajaran moral yang sesungguhnya.²⁹

²⁸ Jean Piaget, *The Moral Judgment of the Child*, trans. Marjorie Gabain (New York: Free Press, 1965), hal. 196–210.

²⁹ Musradinur, 'Pembentukan Moral Mahasiswa Dalam Mewujudkan Budaya Akademik Berbasis Nilai Islami', *Bidayah. Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 10 No. 1 (2019), Hal. 31.

3. Pendidikan Moral

a. Pengertian Pendidikan Moral

Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk moral dan karakter peserta didik. Tugas ini tidak hanya terbatas pada pengajaran akademik, tetapi juga mencakup pembinaan nilai-nilai kehidupan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan kepribadian yang baik. Meski demikian, upaya untuk mengembangkan pendidikan moral dan karakter sering kali menghadapi berbagai kontroversi dan perdebatan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pandangan mengenai pendekatan yang tepat dalam menyampaikan nilai-nilai moral, serta sejauh mana lembaga pendidikan berhak terlibat dalam pembentukan moral peserta didik. Ada yang berpendapat bahwa nilai-nilai moral sebaiknya bersifat universal dan berbasis konsensus sosial, sementara yang lain menekankan bahwa moralitas sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, dan lingkungan keluarga, sehingga tidak bisa diperlakukan secara seragam. Kondisi ini menimbulkan dilema tersendiri bagi para pendidik dalam menentukan metode yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang bijaksana agar pendidikan moral dan karakter dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi perkembangan peserta didik.³⁰

Pendidikan moral yakni usaha sadar tentang mengajarkan nilai kebaikan meliputi perilaku baik, sesuai dengan aturan normatif dan juga tentang sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk individu seperti jujur, dapat dipercaya, adil, bertanggung jawab dan lain-lain, maupun sebagai makhluk sosial dalam hubungannya dengan masyarakat, seperti kejujuran,

³⁰ Andi Taher, 'Pendidikan Moral Dan Karakter : Sebuah Panduan', Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14 No. 2 (2014), Hal. 546.

penghormatan sesama manusia, tanggung jawab, kerukunan, kesetiakawanan, solidaritas sosial dan sebagainya yang terkemas dalam citra kebaikan. Pendidikan moral merupakan suatu aktifitas yang harus dilatih dan mungkin dipaksakan bagi setiap orang sejak dini untuk menjadikan anak yang baik dan mempunyai tingkat kesadaran moralitas yang tinggi dalam mewujudkan tujuan-tujuan sosial.

Disamping bersifat sosial pendidikan moral haruslah bersifat rasional. Locke mengacu pada pendapat-pendapat kaum rasionalis yang menyatakan bahwa tidak ada realita apapun yang membenarkan seseorang membuat pertimbangan secara mendasar diluar lingkup penalaran manusia. Terlepas dari perbedaan kata yang digunakan baik moral, etika, akhlak, budi pekerti mempunyai penekanan yang sama, yaitu adanya kualitas-kualitas yang baik yang teraplikasi dalam perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, baik sifat-sifat yang ada dalam dirinya maupun dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Walau mempunyai perbedaan, namun moral, etika dan akhlaq dapat dianggap sama apabila sumber ataupun produk budaya yang digunakan sesuai.³¹

b. Tujuan Pendidikan Moral

Menurut pandangan Elihami dan rekan-rekannya, tujuan utama dari pendidikan moral adalah membimbing generasi muda agar dapat memahami serta menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara menyeluruh, termasuk setiap silanya. Harapan akhirnya adalah terbentuknya individu-individu yang mampu membangun diri sendiri dan secara kolektif bertanggung jawab dalam proses pembangunan bangsa. Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa pendidikan moral bertujuan untuk: (1) meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) mengembangkan kecerdasan dan

³¹ Matsuhu, 'Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam', Logos, Vol. 2 No. 2 (1999), Hal. 15 <<https://doi.org/10.22515/bg.v2i2.1100>>.

keterampilan, memperkuat akhlak mulia, memperkuat kepribadian, serta menumbuhkan semangat kebangsaan yang kuat.³²

Tujuan utama dari pendidikan moral adalah untuk mengembangkan kemampuan individu dalam berpikir secara moral dan mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai etis. Hal ini berarti bahwa pendidikan moral tidak hanya sebatas mengajarkan mana yang benar dan salah, tetapi juga menekankan pada proses berpikir yang mendalam tentang alasan di balik suatu nilai atau tindakan. Pendidikan moral bertujuan membantu anak-anak memahami landasan mengapa suatu nilai perlu diterima dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka tidak hanya mengikuti aturan secara membuta, tetapi mampu menilai dan memutuskan sendiri berdasarkan pemahaman dan pertimbangan yang matang. Selain itu, pendidikan moral juga bertujuan untuk mendorong tumbuhnya perkembangan pribadi yang optimal, baik dari segi emosional, intelektual, maupun sosial, sehingga setiap individu dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berintegritas, serta mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.³³

c. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Moral

Menurut Latifah ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu,

- 1) Adanya faktor genetik atau hereditas yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan juga perkembangan pada anak.
- 2) Faktor lingkungan, bahwa lingkungan merupakan faktor eksternal yang dapat merubah dan membentuk perkembangan seorang individu.³⁴

³² Anugrah Dwi, "Pendidikan Moral Pancasila dan Contohnya," *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMSU*, 14 Juli 2023, <<https://fkip.umsu.ac.id/tujuan-pendidikan-moral-pancasila/>>.

³⁴ Latifah, 'Aspek Perkembangan Pada Anak Sekolah Dasar: Masalah Dan Perkembangannya', *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 1 No. 2 (2023), Hal. 96.

³³ Syaparuddin Syaparuddin, '*Peranan Pendidikan Nonformal Dan Sarana Pendidikan Moral*', *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 1 No. 1 (2020), Hal. 180 <<https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/317>>.

³⁴ Latifah, '*Aspek Perkembangan Pada Anak Sekolah Dasar: Masalah Dan Perkembangannya*', *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 1 No. 2 (2023), Hal. 96.

d. Proses Perkembangan Moral

Kohlberg menunjukkan bahwa perkembangan moral anak terjadi melalui enam tahapan yang dibagi ke tiga level.

1) Level pertama disebut level prakonvensional.

Level prakonvensional merupakan tahap awal perkembangan moral anak yang biasanya terjadi pada usia sekitar empat hingga sembilan tahun, yaitu sebelum dan selama masa kelas satu hingga tiga sekolah dasar. Pada tahap ini, anak menilai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk berdasarkan pengalaman langsung yang ia rasakan secara fisik. Tolak ukur perilaku masih berpusat pada diri sendiri. Jika suatu tindakan membawa dampak yang menyenangkan atau menguntungkan secara fisik bagi dirinya, maka ia akan cenderung mengulang perilaku tersebut. Sebaliknya, jika tindakan itu menghasilkan pengalaman yang tidak menyenangkan, ia akan menghindarinya di masa mendatang.

Tahapan ini terbagi menjadi dua fase. Fase pertama dikenal sebagai Tahap Orientasi Hukuman dan Kepatuhan. Dalam tahap ini, anak memandang sesuatu sebagai benar atau salah hanya berdasarkan pada konsekuensi langsung yang ia alami—apakah itu menyakitkan atau menyenangkan—tanpa memandang siapa yang memberikan konsekuensi tersebut, apakah itu orang dewasa, teman, atau orang lain. Fase kedua disebut Tahap Orientasi Relativis-Instrumental. Pada tahap ini, anak mulai memahami konsep timbal balik. Misalnya, jika ia diperlakukan dengan baik, ia akan membalas dengan perlakuan baik juga; sebaliknya, jika ia disakiti, ia merasa berhak membalas. Tindakan dianggap benar jika bisa membawa keuntungan tidak hanya untuk

dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Meski demikian, pada tahap ini pola pikir anak masih sangat egosentris dan keputusan moralnya masih sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman.

2) Level kedua disebut level konvensional.

Tahap konvensional merupakan jenjang perkembangan moral yang umumnya dialami anak usia 10 hingga 13 tahun, ketika mereka masih berada di kelas empat sekolah dasar hingga awal sekolah menengah pertama. Dalam fase ini, sesuatu dianggap benar jika mendapat persetujuan dari teman sebaya atau dari figur yang memiliki otoritas atas dirinya, seperti guru atau orang tua. Anak cenderung menyesuaikan diri dengan harapan dan norma yang berlaku dalam kelompok sosialnya karena ingin diterima dan dihargai. Identitas anak banyak dibentuk oleh bagaimana ia berperilaku sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang dipegang oleh lingkungan pergaulannya. Jika dalam kelompoknya ada aturan yang disepakati, anak akan mematuhi demi menjaga posisi dan penerimaan sosial. Pengaruh dari teman sebaya pada tahap ini cenderung lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh dari keluarga di rumah.

Tahap konvensional ini terbagi menjadi dua sub-tahap. Tahap ketiga dikenal sebagai Tahap Orientasi Kesepakatan Pribadi atau sering disebut juga dengan Orientasi “Anak Baik”. Di sini, anak akan melakukan suatu tindakan jika dianggap baik oleh teman-temannya. Ia cenderung mengulang perilaku yang mendapat dukungan dan menghentikan yang ditolak oleh teman. Tahap keempat disebut Tahap Orientasi Hukum dan Ketertiban. Pada tahap ini, anak mulai memahami pentingnya mengikuti aturan dan menghargai otoritas. Ia akan mempertahankan perilaku yang mendapatkan respon positif dari tokoh

otoritatif atau yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika perilakunya ditentang atau dianggap melanggar aturan, ia akan berhenti melakukannya. Tahap ini menandai kesadaran moral anak yang mulai dibentuk oleh struktur sosial dan sistem aturan formal.

3) Level ketiga disebut level pascakonvensional.

Tingkat pascakonvensional merupakan tahap perkembangan moral yang umumnya dicapai anak-anak usia 13 tahun ke atas, yang biasanya berada di jenjang pendidikan kelas tujuh SMP atau lebih tinggi. Pada tahap ini, anak mulai menentukan sendiri apa yang dianggap benar atau baik, tanpa bergantung pada pandangan atau otoritas kelompok maupun individu di sekitarnya. Anak tidak lagi merasa perlu menyesuaikan diri dengan pendapat kelompok tertentu, melainkan mulai menyusun sendiri ukuran moralnya berdasarkan pemikiran rasional. Terdapat dua sub-tahap dalam level pascakonvensional ini. Pertama, Tahap Orientasi Kontrak Sosial Legalistik, di mana anak menyadari bahwa nilai-nilai bersifat relatif dan bahwa setiap individu dapat memiliki pandangan yang berbeda. Untuk menjembatani perbedaan ini, diperlukan usaha untuk mencapai kesepakatan bersama. Bila tercapai konsensus yang diterima masyarakat, maka perilaku anak akan cenderung menyesuaikan diri dengan norma tersebut. Kedua, Tahap Orientasi Prinsip Etika Universal, yang merupakan tahapan tertinggi dalam perkembangan moral. Pada tahap ini, tindakan dianggap benar jika sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang bersifat konsisten, menyeluruh, dan berlaku

secara universal, yang dipegang oleh individu berdasarkan kesadaran moralnya sendiri.³⁵

B. Budaya Bullying di Sekolah

1. Pengertian Budaya

Kata budaya apabila dikupas dari bahasa sansekerta maka dapat dimaknai sebagai “hal-hal yang berkaitan dengan akal”.³⁶ Namun terdapat juga pendapat yang disampaikan oleh P.J Zoetmulder bahwasanya budaya adalah pengembangan kata dari budi dan daya atau daya dari sebuah budi. Berangkat dari hal ini, mengantarkan pada perbedaan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah kegiatan berupa cipta, karsa dan rasa, sedang kebudayaan adalah hasil dari budaya itu sendiri. Cipta merupakan kerinduan akan berbagai hal yang berkaitan pengalaman dalam hidup baik lahir maupun batin. Sedang Karsa adalah kerinduan dalam upaya menginsafi sangkan(kehidupan sebelum lahir) dan paran(kehidupan seusai mati).³⁷ Pendapat tersebut kemudian mendapat tepisan dari salah satu ahli terkemuka, yakni Kuntjoroningrat. Kebudayaan menurut Koentjoroningrat adalah keseluruhan bagian dari manusia berupa kelakuan dan hasil dari kelakuan dan diatur oleh tata kelakuan, yang sumbernya adalah kehidupan masyarakat dan hanya bisa di peroleh dengan hasil belajar saja.³⁸

Menurut Rohiman Notowigado terkait pengertian budaya, beliau mengartikan hasil budaya tersebut menjadi 2 macam. Hal tersebut adalah kebudayaan jasmaniah dan kebudayaan rohaniah. Kebudayaan jasmaniah meliputi segala benda hasil karya

³⁵ Romirio Torang Purba, ‘Perkembangan Moral Menurut Kohlberg Dan Implementasinya Dalam Perspektif Kristen Terhadap Pendidikan Moral Anak Di Sekolah Dasar’, *Aletheia Christian Educators Journal*, Vol. 3 No. 1 (2022), Hal. 13 <<https://doi.org/10.9744/aletheia.3.1.11-20>>.

³⁶ Sumarto. "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum." *Literasiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Humaniora* 1, no. 1 (2021): hal 17. <<https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/download/49/63>>.

³⁷ P.J. Zoetmulder, *Manusia dan Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1983), hal. 13.

³⁸ Koentjaraningrat, ‘*Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*’, edisi revisi (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1990), hal. 180.

manusia dan alat-alat perlengkapannya. Sedangkan kebudayaan rohaniyah adalah hasil dari ciptaan manusia yang tidak mampu diketahui melalui panca indera. Hal tersebut seperti seni, religi, bahasa, ilmu dan lainnya.³⁹

Paparan di atas memberikan penjelasan bahwasanya budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan manusia baik itu tindakan atau pemikiran sehingga menghasilkan adanya kebudayaan dalam bentuk fisik dan non fisik. Selain itu perlu ditekankan bahwa budaya bukan hal yang menurun secara biologis. Budaya hanya didapatkan oleh kita sebagai anggota masyarakat, dan dalam memperolehnya kita harus mempelajarinya. Budaya diperoleh dari masyarakat, dan masyarakat menciptakan budaya untuk mempertahankan kehidupannya.

2. Proses Pembentukan Budaya

Budaya dibentuk oleh manusia dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk mempertahankan kehidupan mereka. Tentunya terbentuknya budaya pasti diepegaruhi oleh faktor-faktor dorongan tertentu, yakni dorongan naluri, inderawi, akal, dan religi.⁴⁰ Sehingga pembentukan budaya bisa dibedakan atas 4 fase yakni sebagai berikut:

a. Fase *Instinctive*

Manusia dilahirkan dengan intuisi atau insting, sehingga menimbulkan dorongan terbentuknya suatu budaya. Misal, seorang bayi pasti akan menunjukkan rasa sedihnya lewat menangis ketika ia merasakan haus atau lapar. Rasa naluriah ini secara natural terbentuk dalam diri manusia, yang mendorong timbulnya budaya dalam diri manusia.

³⁹ Rohman Notowidagdo, " *Ilmu Budaya Asar Berdasrkan Al-Qur'an Dan Hadits*", III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 157.

⁴⁰ Suranto, "Proses Terbentuknya Budaya dan Tradisi," *Anta Sura*, diakses 20 Mei 2025, <<https://suranto-antasura.blogspot.com/2012/12/proses-terbentuknya-budaya-dan-tradisi.html>>

b. Fase Indrawi

Manusia dilengkapi oleh Tuhan dengan panca indera dengan tugas yang maksimal untuk masing-masing individu, ia mampu mendengar, melihat, meraba, bahkan mencium aroma dengan alat inderanya. Hal ini pula yang mendorong manusia menciptakan sebuah karya dari hasil tiruan apa yang ia tangkap dari panca inderanya, sehingga bisa menjadi sebuah keudayaan.

c. Fase Akal

Akal merupakan perbaikan dari apa yang mungkin salah kita tangkap dari panca indera. Karena tidak selalu apa yang ditangkap oleh panca indera kita itu, mengandung kebenaran. Sehingga akal mampu menjadi control atas penyimpanan dari tangkapan panca indera. Akal menciptakan pikiran dan khayalan untuk manusia, yang kemudian hal ini mampu menciptakan suatu karya benda maupun pemikiran dan lain sebagainya, yang kemudian berubah menjadi budaya.

d. Fase Religi

Manusia hanya ciptaan Tuhan semata, yang tentunya setiap tindakan berdasarkan pemikirannya tidak selalu benar dan memerlukan adanya bimbingan. Bimbingan Tuhan inilah yang mampu menciptakan budaya yang dihasilkan oleh manusia menjadi lebih bermanfaat. Hal ini karena manusia akan menjadi lebih tau tentang apa yang seharusnya ia lakukan dan tidak.

3. Wujud Kebudayaan

Pembahasan terkait wujud dari kebudayaan juga dinyatakan oleh Kuntjoroningrat dalam bukunya. Beliau membagi wujud dari kebudayaan ini menjadi 3 bagian. Pertama wujud dari kebudayaan berupa hal-hal kompleks seperti ide, gagasan, nilai atau apapun yang sifatnya mengarah pada hal abstrak. Lapisan paling

abstrak dari kebudayaan adalah nilai budaya, kemudian baru bertingkat pada norma dan hukum, dan terakhir yang paling konkret adalah adat istiadat.

Wujud Kebudayaan kedua adalah suatu pola aktivitas atau perilaku yang memiliki pola, sehingga menjadi berulang dan dilakukan waktu ke waktu yang tentunya ada dalam lingkungan masyarakat. Sifat dari pola aktivitas masyarakat ini adalah konkret, karena keberadaannya bisa dilihat dengan jelas. Misal wujud kebudayaan ini adalah nonkrong kopi pada malam hari yang dilakukan bukan hanya kalangan lansia dan dewasa tapi juga anak muda untuk sekedar bertukar informasi atau saling menghibur.

Wujud yang terakhir dari kebudayaan adalah karya manusia yang berupa benda yang bisa dilihat, dirasa bahkan diraba. Benda ini bersifat sangat konkret karena memang berbentuk fisik secara nyata. Contoh nyatanya adalah perabotan atau peralatan yang sering kita gunakan, dan tentunya selalu mengalami perkembangan dari zaman yang terus berganti.⁴¹

4. Bullying

a. Pengertian *Bullying*

Bullying dapat didefinisikan sebagai tindakan bersifat agresif yang pelakunya adalah seseorang individu atau bisa pula dalam bentuk kelompok yang mana merasa lebih kuat dan berkuasa terhadap mereka yang dianggap lemah karena takut dan merasa tidak mampu melakukan perlawanan terhadap si pelaku dan perlakuan ini dilaksanakan secara berulang dalam beberapa waktu. Perlakuan *bullying* ini bisa terjadi dalam lingkungan tertentu dengan konteks yang hampir

⁴¹ Koentjoroningrat, "*Pengantar Ilmu Antropologi*" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014).

sama tentunya. Bisa terjadi di lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, bahkan kerabat.⁴²

Pendapat Novan mengenai tindakan *bullying* adalah suatu tindakan atau perilaku bersifat negatif dan agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyakiti seseorang dengan ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan secara berulang sehingga timbul penderitaan nyata dari fisik maupun mental. Ketidakseimbangan kekuatan yang ada dimanfaatkan oleh pelaku *bullying* untuk menyakiti korban, hal ini bisa berupa ketidakseimbangan nyata dan perasaan. Dalam ketidakseimbangan nyata bisa berupa gender(kelamin), kekuatan fisik, ukuran tinggi dan berat badan, kecacatan fisik, dan stratifikasi sosial. Sedangkan ketidakseimbangan dalam perasaan bisa berupa, rasa lebih jago atau superior dibanding yang lain, dan kelihaihan dalam berbicara sehingga membuat orang lain menjadi lebih sedikit berbicara dan merasa rendah. *Bullying* juga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siswa atau anak yang merupakan teman sebaya kepada siswa yang lebih lemah demi kepuasan atau keuntungan pribadi si pelaku.⁴³

Selanjutnya yakni pernyataan yang disampaikan oleh Sandi dan Sujarwo yang menyatakan bahwa *bullying* adalah penindasan secara berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok, dengan tujuan tindakan tersebut untuk menyakiti korban secara fisik, dengan memanfaatkan ketidakseimbangan yang ada diantara pelaku dan korban.⁴⁴

⁴² Tifani, "Pengertian Bullying: Jenis, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya," *An-Nur*, diakses 20 Mei 2025, <<https://an-nur.ac.id/blog/pengertian-bullying-jenis-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya.html>>.

⁴³ Novan Andy Wiyani, "*Save Our Children From School Bullying*" (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 14–21.

⁴⁴ Muhammad Sandi Ferdian dan Muhammad Sujarwo, "*Kumpulan Materi Bimbingan Konseling*" (Pekanbaru: Pioner, 2015), hal. 158.

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan di atas kita bisa mengambil garis besar dari definisi atau pengertian mengenai tindakan bullying. Bullying didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan atau perlakuan secara berulang-ulang yang bersifat negatif dan agresif (tindakan bisa berupa kekerasan atau apapun yang bersifat menyakiti korban) oleh seorang individu atau kelompok dengan memanfaatkan perbedaan atau ketidakseimbangan diantara keduanya sehingga korban merasa lemah dan tidak mampu melakukan perlawanan dan si pelaku mendapatkan kepuasan dan keuntungan pribadi.

b. Jenis-jenis *Bullying*

1) *Bullying* Verbal

Tindakan *bully* jenis ini tidak menjadikan sasaran fisik dalam pelaksanaannya namun lebih pada dalam bentuk ucapan atau pesan, bisa berupa ejekan atau cemoohan yang bersifat pribadi atau rasial. Selanjutnya bisa berupa candaan ajakan dan pelecehan seksual, terror, fitnah, intimidasi lewat pesan, gossip dan lain sebagainya. Jenis tindakan *bully* ini memiliki potensi frekuensi lebih tinggi untuk dilakukan oleh para pelaku. Selain itu, tindakan verbal ini juga menjadi gerbang dalam pembullyingan untuk mengarah pada tindakan yang lebih keras dan kejam.⁴⁵

2) *Bullying* Fisik

Kuantitas pada *bullying* jenis ini tidak sebanyak jumlah dalam jenis lainnya. Bullying jenis ini meliputi segala sesuatu tindakan yang menyebabkan adanya penderitaan atau rasa sakit dalam bentuk fisik, bisa berupa memukul,

⁴⁵ Sadaruddin, dkk. "Pencegahan dan Penanganan Perilaku Bullying Verbal di Sekolah Dasar". ISOLEK : Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Bahasa, dan Sastra, Vol. 2 No. 2 (2024) : hal 311

mencekik, menendang, menggigit, menyikut, atau lain sebagainya serta merusak apapun yang menjadi milik si korban.⁴⁶

3) *Bullying* secara Rellasional

Bullying jenis ini menjadikan si korban mengalami pelemahan dan kerendahan dalam harga diri yang dilakukan secara sistematis, untuk menolak keberadaanya dalam lingkungan atau kelompok tertentu juga merusak hubungan yang sebelumnya ada seperti persahabatan. Perlakuan yang biasa dilakukan dalam *bullying* jenis ini adalah hal-hal yang lebih bersifat tersembunyi, seperti tawa ejekan, pandangan sinis, bahasa tubuh yang sifatnya kasar dan lain sebagainya.⁴⁷

4) *Bullying* Elektronik

Para pelaku menggunakan sarana elektronik maupun teknologi untuk melakukan aksinya, bisa dalam berbagai platform dan alat. Yakni segala bentuk pesan dalam media sosial, SMS, email, website, atau bahkan berupa gambar, audio dan juga video. Dalam pembullyingan jenis ini, pelaku biasanya melakukan sikap yang bertujuan untuk mengintimidasi, menyudutkan, menerror, bahkan menyakiti si korban. Kebanyakan pelaku dalam pembullyingan jenis ini adalah kalangan remaja yang memiliki pemahaman dan keahlian dalam bidang Ilmu dan Teknologi.⁴⁸

c. Faktor Penyebab *Bullying*

Faktor penyebab *bullying* bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan juga perasaan tertekan, terintimidasi, tersakiti, dendam dan lain sebagainya. Sehingga

⁴⁶ Rini Yudiati, *Pendidikan Anti Bullying* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hal. 88

⁴⁷ Andrew Mellor, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah & Lingkungan*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hal. 45

⁴⁸ Muhammad Sandi Ferdian dan Muhammad Sujarwo, hal. 160

penyebab bullying dapat digolongkan menjadi beberapa faktor, yakni sebagai berikut:

1) Faktor Keluarga

Dari beberapa penelitian yang ada, terdapat beberapa penyebab adanya pembullying yang berangkat dari hal-hal yang terjadi dalam keluarga. Hal tersebut adalah *over protective* dari orang tua terhadap anak, perceraian, pola hidup berantakan dalam keluarga, tindakan-tindakan yang tidak seharusnya tidak diperlihatkan pada anak namun tetap dilakukan oleh orang tua, seperti bertengkar, mencaci maki, dan saling menghina, memberikan efek yang buruk bagi anak sehingga muncul pribadi yang tidak diharapkan. dan terakhir yakni kebiasaan buruk dalam keluarga sebagai pemicu adanya bullying, seperti kebiasaan untuk melakukan sindiran kasar antar saudara.⁴⁹

2) Faktor Sekolah

Faktor sekolah menjadi sangat penting karena menjadi tempat berlangsungnya tindakan bullying. Kebanyakan bullying terjadi akibat kurang adanya perhatian dari lembaga sekolah untuk menyikapi lebih lanjut mengenai persoalan *bullying* ini, sehingga kasusnya sangat tidak ter-elakkan. Belum lagi rendahnya pengawasan guru dan bimbingan etika untuk mencegah adanya tindakan semacam bullying. Adanya peraturan yang bersifat tidak konsisten dan sangat rendah akan kedisiplinan akan menjadi kebebasan bagi para *bullying* untuk melancarkan aksinya di sekolah.⁵⁰

⁴⁹ Pangesti, Sari, Haenilah, dan Efendi, "Hubungan Pola Asuh Over Protective Orang Tua dengan Perilaku Bullying dan Kemandirian Belajar Peserta Didik," *Pedagogi: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 8, No. 2, 2020.

<<https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/pgsd/article/view/23176>>

⁵⁰ Alfiana Nurussama, "Peran Guru Kelas dalam Menangani Perilaku Bullying pada Siswa," *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Vol. 8, No. 5 (2019): hal. 510–520,

<<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/pgsd/article/download/14958/14509>>.

3) Faktor Media Massa

Di era digital ini, banyak informasi dan hiburan yang bisa kita dapatkan dengan mudah dan cepat melalui berbagai media massa dengan teknologi semakin mutakhir. Namun tidak menutup kemungkinan banyak hal negative yang terjadi akibat tayangan atau tontonan yang disajikan dalam beberapa media massa, yang terkadang ditonton oleh anak yang belum mencapai usia batasan untuk menonton tayangan tersebut. Adegan-adegan yang bersifat negatif yang belum bisa dicerna anak dengan baik akan ditiru dan menimbulkan hal-hal yang berdampak negative, termasuk bullying. Seperti adegan kekerasan dari suatu film, atau bahkan adegan seksual, hal ini sangat mudah untuk ditiru dan dipraktekkan oleh si anak di kehidupan nyata.⁵¹

4) Faktor Budaya

Faktor ini terjadi apabila anak harus hidup dalam sebuah daerah yang memiliki kebiasaan, peraturan, dan kehidupan sosial yang cukup bermasalah. Seperti banyaknya politik tidak sehat dan kacau, banyak tindakan diskriminasi yang terus menerus terjadi, perekonomian yang tidak teratur menyebabkan banyak kerusuhan sosial dan tindakan criminal yang semakin membudidaya. Adanya konflik dalam masyarakat yang tidak kunjung selesai juga termasuk bagian dari faktor budaya yang mempengaruhi munculnya pembullyingan. Hal ini terjadi karena, akibat budaya tidak baik yang ada di masyarakat ini, mampu membentuk pribadi anak menjadi mudah stress, arogan, bahkan kasar.⁵²

⁵¹ Windy Sartika Lestari, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik," *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, Vol. 4, No. 2 (2017): hal. 123–130, <<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIOITK/article/download/4385/pdf>>.

⁵² Windy Sartika Lestari, hal. 131–138.

5) Faktor Teman Sebaya

Teman juga mejadi faktor yang menyebabkan adanya pembullying karena dengan adanya interaksi antara teman ini bisa mendorong seroang anak untuk melakukan hal yang sama dilakukan oleh anaknya, seperti ketika mereka berinterkasi dengan anak yang memang memiliki kebiasaan lumayan buruk untuk melawan guru, megejek dan kasar pada teman, dan membolos. Selain itu, bully juga kadang terjadi akibat adanya rasa untuk membuktikkan kepada teman sebayanya bahwa dia adalah orang yang bisa diterima dalam pergaulan mereka dengan membuktikkannya melalui *bullying*.⁵³

Selanjutnya Astuti juga menyatakan pendapat terkait faktor penyebab adanya tindakan *bullying*. Astuti membagi faktor ini menjadi 2 yakni, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang dinyatakan oleh Astuti adalah adanya hubungan kurang harmonis dalam sebuah kerluarga, faktor pergaulan dengan teman sebaya, dan juga pengajaran dan pengwasa yang kurang dari pihak sekolah. Sedangkan faktor internal penyebab tindakan *bullying* menurutnya sangat berkiatan dengan karakter pribadi dari masing-masing pelaku *bullying*. Hal tersebut seperti mudah cemas, agresif, kecerdasan emosional yang rendah sehingga sulit bersosialisasi, dan lain sebagainya.⁵⁴

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan di atas, definisi *bullying* adalah melakukan tindakan yang negative dan agresif serta kejam oleh pelaku yang merasa dirinya lebih berkuasa kepada orang yang ia anggap lebih lemah darinya, akibat adanya ketidakseimbangan antara keduanya. Dari pernyataan ini

⁵³ Hanifah. "Pengaruh Konformitas Teman Sebaya dan Kepercayaan Diri Terhadap Perilaku Bullying Verbal Remaja". Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 11 No. 2 (2025): hal. 177-186.

<<https://jurnal.umbarru.ac.id/index.php/bkmb/article/view/949>>

⁵⁴ Abdulloh Addha, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Resiliensi Siswa Korban Bullying Di Kelas X MA Pondok Pesantren Dahrun Nahdhah Thawalib Bangkinang" (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), hal. 36.

kita bisa mengetahui bahwa *bullying* merupakan tindakan merendahkan seorang atau sekelompok orang. Perilaku ini dilarang dan dijelaskan dalam suatu hadis dengan penjelasan yang gamblang. Yakni pada kitab Sunan Ibnu Majah dengan redaksi hadis sebagai berikut.

“Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Humaid Al Madani telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Qais dari Abu Sa'id bekas budak 'Amir dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cukuplah seseorang dikatakan telah berbuat jahat jika ia merendahkan saudaranya muslim".⁵⁵

Redaksi dalam hadis di atas menunjukkan bahwa perilaku untuk merendahkan orang lain dengan alasan apapun termasuk perbuatan jahat, apalagi hal ini disampaikan langsung oleh Nabi. Terdapat pula hadis lain yang membahas terkait tindakan *bullying* yang didasarkan pada larangan merendahkan orang lain. Hadis ini lebih panjang dan terdapat dalam kitab Shahih Muslim Nomor 4650, dengan redaksi sebagai berikut.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab; Telah menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Qais dari Abu Sa'id budak 'Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan

⁵⁵ Abu Hurairah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 4203, dalam “Hadis: Cukuplah seseorang dikatakan telah berbuat jahat jika ia merendahkan saudaranya muslim,” diakses 25 Mei 2025 <<https://www.hadits.id/hadits/majah/4203>>.

muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya." Telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Usamah yaitu Ibnu Zaid Bahwa dia mendengar Abu Sa'id - budak- dari Abdullah bin Amir bin Kuraiz berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: -kemudian perawi menyebutkan Hadis yang serupa dengan Hadis Daud, dengan sedikit penambahan dan pengurangan. Diantara tambahannya adalah; "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. (seraya mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau)".⁵⁶

Jika kita lebih mencermati hadis di atas, hadis ini awalnya digunakan untuk memberikan peringatan kepada khususnya umat Islam untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan saling merendahkan di antara mereka dengan cara apapun, baik mencemooh, mengintimidasi, mengghibah, meremehkan, mendengki, dan lain sebagainya. Karena hal-hal yang berkaitan dengan merendahkan atau meremehkan merupakan sumbu dari munculnya perpecahan dalam sebuah kelompok masyarakat kecil maupun besar. Peringatan ini dikhususkan kepada umat Islam, sehingga memberikan indikasi bahwa adanya hadis ini terjadi di jaman masyarakat madaniyyah telah terbentuk. Dimana seluruh susunan pemerintahan sudah tertata dengan matang. Kita juga tahu bahwa pada era zaman tersebut, pengajaran bukan lagi berfokus pada penyampaian akidah dan

⁵⁶ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, no. 4650, dalam "Hadis: Haramnya berlaku zhalim kepada sesama muslim, menghina dan meremehkannya," diakses 25 Mei 2025 <<https://www.hadits.id/hadits/muslim/4650>>.

syariat Islam, melainkan lebih berkaitan dengan *mu'amalah* dan aspek-aspek sosial lainnya. Sehingga kita juga bisa mengetahui bahwa peringatan ini mengajarkan bahwa perilaku merendahkan orang lain atau apapun yang mengarah pada tindakan *bullying* merupakan perilaku yang sangat dilarang dalam prespektif Islam dan termasuk dalam perilaku yang sangat buruk dalam aspek sosial, bahkan penyampaianya berulang kali dalam beberapa hadis.

Selain hadis di atas, masi terdapat dalil yang secara nyata melarang adanya tindakan merendahkan orang lain atau *bullying*. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat: 11 dijelaskan sebagai berikut.

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَّا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَئِنَّ نِسَاءَ الَّذِينَ نَسَاءُ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَئِنَّكُمْ لَتَلْمِزُونَ مَا أَنْفُسَكُمْ وَلَئِنْ تَبَابَ زُرُّوا لِلَّهِ فَاَبْئِسَ الَّذِينَ الْفُوسُوقُ بِعُرُوسِ الْوَيْهَاتِ لَئِنَّهُمْ لَآئِمُّونَ وَمَنْ لَّا يَتَّقِ

يَتَّبِعُوا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.⁵⁷

⁵⁷ Al-Qur'an. Surah Al-Hujurat, ayat 11. Diakses pada 25 Mei 2025, dari <<https://quran.nu.or.id/al-hujurat/11>>

Tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Buya Hamka menjelaskan bahwa pembahasan utama dalam ayat di atas adalah terkait hal-hal yang berhubungan dengan memperolok-olok atau merendahkan. Beliau menjelaskan ayat ini dengan menjadikan beberapa bagian untuk detail pembahasannya. Pada bagian pertama, beliau menafsirkan bahwa ayat ini ditujukan sebagai peringatan sekaligus nasihat bagi setiap orang beriman untuk tidak melakukan “yaskhar” yakni sikap merendahkan atau meremehkan orang lain dengan mengejek, menghina, menjelekkkan dan segala bentuk perbuatan semacamnya. Pada bagian kedua, berisikan nasihat dan sindiran halus untuk menyadarkan setiap pelaku bahwa tidak menutup kemungkinan orang yang mereka rendahkan tidak lebih buruk darinya. Selanjutnya yakni bagian ketiga, pembahasan pada bagian tiga ini adalah pembahasan yang hampir sama dengan pembahasan pertama dan kedua namun lebih dikhususkan lagi untuk kaum wanita. Bagian keempat membahas mengenai larangan untuk melakukan celaan pada diri sendiri. Bagian kelima melarang kita untuk memberikan orang lain atau diri kita dengan gelar yang buruk. Bagian keenam menjelaskan mengenai panggilan yang paling buruk adalah panggilan nama yang fasik ketika ia sudah beriman. Dan pada bagian paling akhir sekaligus penutup beliau menyampaikan bahwa “Barang siapa yang tidak mau bertobat maka ia termasuk orang-orang yang aniaya”.

Dari penjelasan di atas, kita bisa mengetahui bahwasanya tindakan meremehkan atau merendahkan adalah suatu hal yang benar-benar dilarang baik dari kalangan wanita maupun pria. Kita juga diharuskan untuk senantiasa introspeksi diri, dan tidak menyombongkan apapun yang ada dalam diri kita. Sehingga perasaan untuk menilai orang lain lebih rendah terhindarkan dari dalam diri kita. Karena setiap manusia diciptakan dengan kesempurnaannya masing-

masing, dan Allah tidak pernah mengizinkan kita untuk menjelekkkan atau menilai rendah apapun yang telah diciptakan oleh-Nya.⁵⁸

5. Budaya *Bullying* di Sekolah

Bullying terjadi di negara ini tanpa hentinya tentu memiliki faktor-faktor penyebab yang menjadi inti masalah yang masih belum ditemukan solusinya. Perilaku *bullying* sangat sering terjadi akibat kurangnya sikap empati dalam diri pelaku, selain itu rendahnya sikap asertif dari korban menjadikan para korban *bullying* tidak bisa berbuat banyak dan lebih memilih diam. Sehingga jika dikaji kembali dengan mempertimbangkan beberapa kajian teori sebelumnya, *bullying* adalah tindakan yang lahir dan dibentuk oleh manusia dengan cara merendahkan atau lain sebagainya. Kemudian *bullying* yang terus dilakukan berulang kali akibat sulit untuk bisa dikontrol, menyebabkan munculnya pola aktivitas baru di lingkungan warga di sekolah. Dan ini merupakan bukti bahwa *bullying* juga bagian dari wujud budaya di lingkungan sekolah, sesuai seperti apa yang telah dikaji dalam pembahasan sebelumnya.

Bullying di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, verbal, hingga *cyberbullying*. Sebuah survei oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 41,1% anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, dan 22,4% di antaranya adalah korban *bullying*. Angka ini menunjukkan bahwa *bullying* merupakan masalah yang luas dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Dalam konteks budaya, nilai-nilai, norma, dan kepercayaan dalam masyarakat memainkan peran krusial dalam bentuk dan tingkat *bullying*. Budaya yang

⁵⁸ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 26, Surah Al-Hujurat ayat 11, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
<https://archive.org/details/tafsiralazhar08_201912>

memperkuat dominasi, kekerasan, atau diskriminasi cenderung memiliki tingkat *bullying* yang lebih tinggi. Budaya yang mempromosikan inklusi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan cenderung menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Misalnya, dalam beberapa budaya tindakan yang dianggap sebagai *bullying* dalam konteks Barat mungkin dianggap sebagai bagian dari dinamika sosial yang normal atau bahkan dianggap sebagai cara untuk mengajarkan "kekuatan" kepada individu yang lebih lemah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa definisi dan persepsi terhadap *bullying* dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada konteks budaya dan sosial masyarakat tertentu.

Pentingnya perspektif budaya dalam memahami *bullying* adalah untuk mengakui bahwa nilai-nilai, norma-norma, dan struktur kekuasaan yang ditemukan dalam suatu budaya dapat memengaruhi frekuensi, jenis, dan respon terhadap perilaku intimidasi. Misalnya, dalam budaya yang menekankan nilai-nilai seperti kekuatan fisik, otoritas hierarkis yang kuat, atau penghargaan terhadap agresi sebagai cara untuk menunjukkan dominasi, perilaku *bullying* mungkin lebih sering terjadi dan lebih diterima.

Selain itu, aspek-aspek budaya seperti pandangan terhadap maskulinitas dan femininitas, toleransi terhadap keberagaman, serta sikap terhadap konflik dan resolusi juga dapat memengaruhi dinamika *bullying* dalam suatu masyarakat. Misalnya, dalam budaya yang menekankan keberagaman dan inklusivitas, perilaku *bullying* mungkin lebih tidak toleran dan lebih mungkin untuk ditolak.

Dengan memahami perspektif psikologi, sosial, dan budaya tentang *bullying*, kita dapat mengembangkan pendekatan yang holistik dalam mencegah dan menangani masalah ini. Pencegahan dan penanganan *bullying* memerlukan pendekatan yang komprehensif dari perspektif psikologis. Ini termasuk pendidikan tentang kesetaraan,

promosi empati dan pengertian, serta pembentukan lingkungan yang mendukung di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Langkah-langkah preventif dan intervensi *bullying* tersebut perlu diiringi upaya bersama dari lembaga pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak agar terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk *bullying* dan perundungan di satuan pendidikan.⁵⁹

C. Implementasi Pendidikan Moral

Secara umum, implementasi bisa diartikan sebagai proses menjalankan atau menerapkan sesuatu, misalnya kebijakan, program, atau rencana. Menurut Browne dan Wildavsky, implementasi adalah perluasan dari berbagai kegiatan yang saling menyesuaikan satu sama lain agar tujuan bisa tercapai. Pandangan serupa juga disampaikan oleh McLaughlin, yang menjelaskan bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan yang harus disesuaikan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa implementasi melibatkan langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mewujudkan suatu gagasan atau kebijakan secara nyata.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merujuk pada suatu bentuk aktivitas atau tindakan nyata dalam menjalankan suatu sistem. Istilah "mekanisme" di sini menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya sekadar tindakan biasa, melainkan sebuah proses yang dirancang secara terstruktur dan dilaksanakan dengan serius sesuai dengan aturan atau pedoman tertentu, dengan tujuan untuk mencapai hasil atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁶⁰

⁵⁹ Nur Asiah, "*Bullying di Sekolah: Perspektif Psikologi, Sosial, dan Budaya*". Dikutip pada tanggal 8 Februari 2025

⁶⁰ Eka Syafriyanto, "*Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial*". Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6. 2015

Nana Sudjana menekankan bahwa dalam implementasi pendidikan harus ada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sistematis, dan evaluasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan.⁶¹

a. Perencanaan

1. Menentukan fokus penelitian dan penyesuaian paradigma serta teori.
2. Pengecekan dan peninjauan alat penelitian sebelum implementasi.
3. Melihat kondisi siswa dan menyesuaikan aturan apa yang bisa diterapkan.

b. Pelaksanaan

1. Pengumpulan data dengan metode yang telah direncanakan.
2. Implementasi strategi pendidikan, termasuk metode pembelajaran dan interaksi sosial.
3. Penerapan aturan pendidikan untuk menunjang efektivitas pembelajaran.
4. Pelaksanaan evaluasi terhadap perilaku dan perkembangan peserta didik dalam aspek sosial dan moral.

c. Evaluasi

1. Pengukuran sejauh mana tujuan pendidikan tercapai.
2. Identifikasi apa saja yang perlu perbaikan dalam metode pengajaran dan kebijakan pendidikan.
3. Penilaian terhadap kontribusi peserta didik dalam pembelajaran kolektif dan pemahaman norma sosial.
4. Penyusunan laporan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

⁶¹ Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2009

D. Efektivitas Pendidikan Moral Dalam Menanggulangi *Bullying*

Menurut Miarso, efektivitas pembelajaran merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pendidikan, yang biasanya diukur berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan mengelola kondisi pembelajaran dengan tepat, yaitu melakukan tindakan yang benar dalam proses belajar-mengajar. Supardi menambahkan bahwa pembelajaran yang efektif adalah kombinasi dari berbagai aspek, termasuk faktor manusia, bahan ajar, fasilitas, peralatan, serta prosedur yang diterapkan, dengan tujuan membentuk perilaku siswa ke arah yang lebih baik dan positif.⁶²

Untuk mengukur efektivitas penerapan pendidikan moral, beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:

1. Perubahan Perilaku Peserta Didik: Pengamatan terhadap perubahan positif dalam sikap dan tindakan siswa, seperti peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan.
2. Penurunan Perilaku Negatif: Evaluasi terhadap berkurangnya insiden perilaku negatif, seperti tawuran, bullying, atau pelanggaran tata tertib sekolah.
3. Peningkatan Prestasi Akademik: Analisis korelasi antara pendidikan moral dan capaian akademik siswa, dengan asumsi bahwa moral yang baik mendukung proses belajar yang lebih efektif.
4. Kepatuhan terhadap Nilai dan Norma Sosial: Observasi mengenai sejauh mana siswa mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, seperti rasa hormat kepada guru dan sesama siswa.

⁶² Yusufhadi Miarso. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana. 2004

5. Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial: Partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sosial atau kemasyarakatan yang mencerminkan penerapan nilai-nilai moral, seperti kegiatan bakti sosial atau gotong royong.
6. Umpan Balik dari Lingkungan Sekitar: Masukan dari guru, orang tua, dan masyarakat mengenai perubahan perilaku dan sikap siswa setelah penerapan pendidikan moral.⁶³

⁶³ Abd Rahman. *“Efektivitas Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam Membentuk Moral Peserta Didik”*.

